



Buletin

Parlementaria

Nomor 1039/I/II/2019 • Februari 2019

DPR Sepakati RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Belarus



Pemberitaan Media
Harus Lebih Berimbang

Hlm. 3

RUU Permusikan Berikan Musisi
Hak atas Karya Cipta

Hlm. 4

DPR Sepakati RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Belarus

Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan telah disepakati oleh sepuluh Fraksi di Komisi I DPR RI dan pemerintah untuk dibawa ke pembahasan tingkat lanjut atau Rapat Paripurna.

Hal ini ditandai dengan diketuknya palu oleh pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais (F-PAN) dan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan oleh perwakilan fraksi dan pemerintah yang diwakili Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (28/1).

“Saya kira Komisi I dan pemerintah sudah sepakat mengenai pengesahan persetujuan ini. Maka dari itu saya nyatakan bahwa RUU tersebut dapat kita setuju untuk dibawa ke Paripurna menjadi undang-undang,” kata Hanafi sembari mengetuk palu.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung menuturkan, RUU ini dapat segera disahkan menjadi UU mengingat kepentingan yang sama antar

kedua negara. Di satu sisi ia melihat bidang pertahanan Republik Belarus memiliki potensi yang dapat dipelajari oleh Indonesia.

“... Indonesia perlu membangun rasa saling percaya antar kedua negara, sehingga diperlukan kerja sama dengan pemerintah Republik Belarus. Mengingat Republik Belarus memiliki potensi yang lebih baik, khususnya di bidang teknologi roket, elektronika, dan pertahanan udara”

“Saya pikir Indonesia perlu membangun rasa saling percaya antar kedua negara, sehingga diperlukan kerja sama dengan pemerintah Republik Belarus. Mengingat Republik Belarus memiliki potensi yang lebih baik, khususnya di bidang teknologi roket, elektronika, dan pertahanan udara,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Di lain sisi, Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira juga sepakat bahwa kerja sama tersebut sangat dibutuhkan, mengingat saat ini Indonesia sedang dalam tahap pengembangan alutsista. “Namun demikian, dalam menjalin kerja sama tersebut, kepentingan nasional Indonesia tetap harus menjadi perhatian utama dari pemerintah maupun semua pihak yang terkait,” jelas legislator PDI-Perjuangan itu.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang hadir dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI ini berharap, RUU ini selesai dalam waktu dekat. Menurutnya, jika sudah diatur dalam UU, kerja sama pertahanan Indonesia dengan negara lain dapat berlangsung lancar dan tidak ada masalah.

“Republik Belarus merupakan negara alternatif dalam melakukan kerja sama di bidang pertahanan. Oleh karena itu, hal ini akan membuka kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan alih teknologi, pengembangan produk, serta perbaikan alat sistem pertahanan dengan adanya kerja sama tersebut,” jelas Ryamizard. ■
eps/sf



Foto bersama Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu

Foto: Anief | IHR

Pemberitaan Media Harus Lebih Berimbang

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap di tengah maraknya *hoaks* yang dikaitkan dengan pesta demokrasi yang akan digelar pada April nanti. Menurutnya, industri media wajib tetap menyajikan pemberitaan yang berimbang. Teori-teori jurnalisme yang selama ini sudah dipelajari diharapkan untuk benar-benar dilaksanakan oleh para jurnalis.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Foto: Azka | IHR

Wakil Ketua DPR RI

Fahri Hamzah berharap di tengah maraknya *hoaks* yang dikaitkan dengan pesta demokrasi yang akan digelar pada April nanti. Menurutnya, industri media wajib tetap menyajikan pemberitaan yang berimbang. Teori-teori jurnalisme yang selama ini sudah dipelajari diharapkan untuk benar-benar dilaksanakan oleh para jurnalis.

“Saya berharap seperti grup Tribunnews ini tidak berafiliasi kepada partai politik dan tidak berafiliasi kepada kepentingan-kepentingan yang pragmatis. Sifatnya harus murni perjuangankan jurnalisme

”**Saya berharap seperti grup Tribunnews ini tidak berafiliasi kepada partai politik dan tidak berafiliasi kepada kepentingan-kepentingan yang pragmatis. Sifatnya harus murni perjuangankan jurnalisme**

kepada kepentingan-kepentingan yang pragmatis. Sifatnya harus murni perjuangankan jurnalisme,” kata Fahri kepada *Parlementaria* setelah mengunjungi Kantor Redaksi Tribunnews di Jakarta, Selasa (29/1).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu menambahkan, jurnalisme itu pada dasarnya adalah perjuangan. Untuk itu setiap berita yang disajikan harus seimbang atau *cover both side*, serta harus tetap melakukan *check and recheck*. Dengan begitu, dapat meredam kegaduhan yang tengah terjadi di masyarakat.

Fahri berpendapat bahwa kultur demokrasi Indonesia menganut sistem keterbukaan. Untuk itu ia mengimbau antara institusi politik dan media harus saling mempertajam, saling memperkuat dan terbuka bukan saling menjatuhkan.

“Ya ini biasa kan kalau teman-teman mengundang, saya akan datang. InsyaAllah kita selalu ingin bekerja sama dengan institusi media karena antara institusi politik dan media itu sama-sama industri pemikiran,” pungkas legislator dapil NTB itu. ■ **es/sf**



- PENGAWAS UMUM**
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
- PIMPINAN REDAKSI**
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Sofyan Efendi
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra
SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari
ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistono, S.H, Erman Suhendri, S.Sos.I,
Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Natasya Armanda Prihandini,
S.Kom. Rahayu Setyowati, Muhammad Husen Virgianne Meiske,
Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar,
Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli,
Singgih Rimbani Kinanti, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Anrimi
Puspa Ratri, Nafisa Hanum Alaydrus,
Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha,
Puntho Pranowo.
FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah
Gerald Opie.
ANALIS MEDIA
Ahyar Tibi, Depriisa Citra Akbari,
Sunarya, Fahmi Harfa, Nathan Dimas Saminto,
Safitri Restu Widaywati. SIP,
INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natalio, Fajar Suryanto.
ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

- PENERBITAN**
PIMPINAN PENERBITAN
Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen
DESAIN GRAFIS
Dito Sugito
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman
PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Konpres Ketua DPR RI Bambang Soesatyo usai menerima Konferensi Musik Indonesia (KAMI)

Foto: Ojii HR

RUU Permusikan Berikan Musisi Hak atas Karya Cipta

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menginginkan sebuah karya musik bisa menjadi aset yang mempunyai nilai ekonomis bagi penciptanya. Seperti halnya produk properti, kendaraan ataupun hasil kebun dan ternak. Sehingga, musik bisa dijadikan sebagai salah satu agunan ke bank ataupun mempunyai manfaat ekonomi lain bagi penciptanya.

Ke depan Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan menjadikan karya seni sebagai industri ekonomi kreatif yang memberikan pemasukan finansial bagi pencipta dan penggiat musik. Dengan begitu konsekuensinya ada perputaran ekonomi dan pemasukan pajak bagi negara. Jika tata kelola permusikan baik maka semua pihak bisa diuntungkan dengan aturan ini.

“Bukan hanya memastikan setiap musisi mendapatkan hak atas setiap karya ciptanya, RUU Permusikan juga bisa memastikan setiap musisi yang sudah menerima haknya tidak melupakan kewajibannya membayar pajak. Karena itu, RUU ini nantinya akan kita bahas lintas Komisi melibatkan Komisi III dari sektor penegakan hukum, Komisi X dari segi hak yang diperoleh para musisi, maupun Komisi XI dari segi penerimaan negara dan pemanfaatan karya musik di

dunia perbankan,” urai Bamsuet, sapaan akrabnya, saat menerima Konferensi Musik Indonesia (KAMI) di ruang kerja Ketua DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/1).

Turut hadir mendampingi Bamsuet, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Mahesa, Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah, dan Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait. Adapun sejumlah musisi lintas generasi yang hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Glenn Fredly, Tompi, Cholil ‘Efek Rumah Kaca’, Andien, Grace Simon, Masgib, Rian D’Masiv, Yuni Shara, Nanda Persada, Kadri Muhammad, Vira Talisa, Rian Ekky, dan Adisti Adikusumah.

Bamsuet menjelaskan, DPR RI sudah mengesahkan UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan yang memberikan jaminan hak ekonomi bagi pencipta karya seni. Namun, pemanfaatannya dalam industri belum bisa maksimal karena

belum ada RUU yang mengatur tata kelolanya. Karenanya, diharapkan RUU Permusikan bisa menjadi jalan keluarnya.

Sebelum dibahas lebih komprehensif di DPR RI, legislator dari Jawa Tengah VII ini mendorong agar para musisi bisa satu suara terlebih dahulu dalam memandang RUU tersebut. Sehingga, di kemudian hari tidak ada pertentangan dari musisi lainnya. Dengan demikian, DPR RI bisa mengetahui dengan jelas apa saja kebutuhan yang diinginkan oleh para musisi.

“Jangan sampai pembahasan RUU ini *muter-muter* tidak jelas. Nanti satu kelompok musisi mendukung, yang lainnya menolak, atau merasa tidak dilibatkan. Saya meminta KAMI sebagai *leader* bagi para musisi dalam memperjuangkan RUU, segera merangkul semua kalangan musisi dan membuat apa saja poin-poin substansi yang diharapkan,” terang Bamsuet.

Politisi Partai Golkar ini yakin, jika tata kelola industri musik di Tanah Air bisa diatur secara baik, manfaatnya bukan hanya diterima oleh musisi saja. Melainkan juga oleh rakyat, bangsa, dan negara Indonesia dalam skala yang luas. Sebagai contoh, Korea Selatan memiliki ‘Music Industry Promotion Act’ dan Jerman memiliki ‘Act to Strengthen the Contractual Position of Authors and Performing Arts’.

“Dari Korea Selatan dan Jerman kita bisa belajar tentang dua hal. Yaitu adanya pemberian subsidi atau jaminan dari pemerintah untuk menggairahkan industri musik, serta adanya standarisasi yang memperjelas hubungan antara pihak industri dengan musisi. Ini bisa menjadi pijakan bagi kita. DPR RI perlu tahu bagaimana kedua hal tersebut bisa berjalan dari sisi kacamata musisi. Jangan sampai yang berjuang membuat undang-undang (DPR RI) lebih semangat dibanding yang diperjuangkannya (musisi),” jelas Bamsuet.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Bamsuet menyampaikan RUU Permusikan yang sudah ditetapkan menjadi Prolegnas Prioritas 2019 masih mungkin diubah namanya menjadi RUU Tata Kelola Industri Musik. Fungsinya mengatur tata kelola industri musik agar hak ekonomi maupun hak-hak lainnya yang diperoleh oleh musisi sebagaimana sudah diatur dalam UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan, bisa dipastikan sampai ke tangan mereka. Selain, mengatur sanksi terhadap industri yang tidak menyampaikan hak ekonomi tersebut ke para musisi. ■ **eko/sf**

Komisi II Dorong Program PTSL di Tomohon Berkualitas

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mendorong agar Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Tomohon dilaksanakan secara berkualitas. Jangan sampai persoalan sertifikat tanah ini menjadi persoalan di masa yang akan datang karena mengejar target.

Ia mengapresiasi kinerja Badan Pertanahan (BPN) Kota Tomohon, namun perlu ada evaluasi mengenai jumlah rasional sertifikat yang bisa dikerjakan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mendorong agar Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Tomohon dilaksanakan secara berkualitas. Jangan sampai persoalan sertifikat tanah ini menjadi persoalan di masa yang akan datang karena mengejar target. Ia mengapresiasi kinerja BPN Kota Tomohon, namun perlu ada evaluasi mengenai jumlah rasional sertifikat yang bisa dikerjakan.

“Kemudian dari sisi anggaran, jangan juga kita mengerjakan sesuatu di luar batas kemampuan. Seperti yang saya sampaikan saat rapat, jangan sampai secara kuantitas akan tercapai, tetapi secara kualitas akan menjadi persoalan di masa yang akan datang,” kata Herman usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan jajaran BPN Kota Tomohon, di Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (29/1).

Menurut legislator dapil Jabar VIII ini, karena target luasan bidang tanah yang ditetapkan oleh pemerintah begitu tinggi capaiannya, yang dikelompokkan menjadi Kategori 1, Kategori 2, Kategori 3 dan, Kategori 4. Pihaknya tidak ingin suatu saat Kategori 1 (tanah tersebut



Foto: Jaka | IHR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron memimpin Kunspek ke Kota Tomohon, Sulut

statusnya *clean* dan *clear*) terbatas penyelesaiannya, tetapi Kategori 2, 3 dan 4 yang masih bermasalah diusulkan di akhir tahun dan terakumulasi di tahun-tahun selanjutnya.

“Oleh karena itu, kami akan terus mengakses program ini, supaya proses sertifikasi yang lama ini bisa diselesaikan ketika masuk anggaran baru dan target yang baru bisa mempersempit terhadap proses penyelesaian baik K2, K3, K4. Sehingga ini betul-betul riil, yang dikerjakan PTSL betul-betul sertifikat dapat diserahkan kepada rakyat. Karena bagaimanapun program ini memang diharuskan untuk rakyat,” ungkap legislator Partai Demokrat itu.

Selain itu, kata Herman, terkait konflik pertanahan di Kota Tomohon, ada beberapa kasus baik yang sedang berlangsung dimediasi maupun yang sudah masuk kepada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Dalam hal ini kompleksitas di dalam penguasaan hak tanah oleh masyarakat dengan berbagai

statusnya ini harus memiliki kepastian hukum dan ini selaras dengan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan, dimana berbagai aspek yang menjadi temuan dilapangan ini akan menjadi proses pembahasan.

“Kami akan mencari solusi kebijakan dan regulasi yang tepat. Kebijakan penyelesaian konflik pertanahan yang secara keseluruhan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini memberikan afirmatif bahwa keagrariaan itu meliputi beberapa aspek dan mengandung unsur-unsur tanah dan air,” ujarnya.

Dalam penyusunan RUU pertanahan ini, Herman memastikan pihaknya juga ingin meletakkan pondasi yang kuat. UU ini sebagai *lex specialis* yang juga memberikan afirmatif terhadap rakyat, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai negara dan kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. ■jk/sf

Komisi II Apresiasi Capaian Pelaksanaan PTSL Kulon Progo

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengapresiasi capaian pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang mencapai angka 95,11 persen atau 352.889 bidang tanah dari 12 kecamatan dan 88 desa. Menurut Mardani, angka tersebut merupakan salah satu contoh yang baik kesuksesan pelaksanaan PTSL.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera

“Kami bahagia sekali dengan angka 95,11 persen PTSL pendaftaran yang luar biasa tingginya. Menurut kami Kulon Progo salah satu contoh yang baik kesuksesan pelaksanaan PTSL,” kata Mardani usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI dengan Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian ATR/BPN Sudarsono, Kepala Kanwil BPN DIY Tri Wibisono, dan Plt. Kepala BPN Kulon Progo Slamet Suseno, di Kantor Bupati Kulon Progo, DIY, Selasa (29/1).

Selain itu, politisi Fraksi Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) ini menilai proses relokasi untuk masyarakat Kulon Progo yang terdampak pembangunan Bandara New Yogyakarta *International Airport* sudah berjalan baik. Salah satunya terkait ganti rugi secara umum sudah dilaksanakan dengan baik dan penanganan kasus sengketa tanah sangat kecil, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

“Karena kita sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ternyata prosesnya berjalan dengan baik.

Ada lima desa, semua sudah terpetakan dengan baik. Ganti rugi secara umum sudah diterima. Yang belum pun konsinyasi dengan baik. Bukan hanya itu, proses relokasinya sudah dipetakan. Sehingga kami melihat proses pembangunan yang manusiawi dan menjaga kepentingan nasional dan masyarakat terwujud di Kulon Progo ini,” tambah Mardani.

Terkait dengan pembahasan revisi UU Pertanahan, legislator daerah pemilihan Jawa Barat itu optimis revisi UU Pertanahan dapat selesai sebelum berakhirnya periode 2014-2019. Mardani mengingatkan bahwa revisi UUS Pertanahan adalah bukan pengganti UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan

“**... proses relokasi untuk masyarakat Kulon Progo yang terdampak pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport sudah berjalan baik. Salah satunya terkait ganti rugi secara umum sudah dilaksanakan dengan baik dan penanganan kasus sengketa tanah sangat kecil, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.**

Dasar Pokok-Pokok Agraria, melainkan penyempurnaan dari UU tersebut.

“Terkait revisi UU Pertanahan, kami bersyukur dari sekitar 700-an Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kami sudah menyelesaikan 400-an. Mungkin dalam waktu dekat kami tuntaskan, kemudian kami akan melakukan rapat dengar pendapat umum, pengambilan keputusan tingkat satu kalau dimungkinkan. Kalau memungkinkan, sebelum berakhirnya periode 2014-2019, UU pertanahan yang baru sudah bisa kita dapatkan,” tutup Mardani.

Sebelumnya, Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo mengatakan, bidang tanah yang sudah terdaftar di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2018 sebanyak 352.889 bidang atau 95,11 persen. “Kabupaten Kulon Progo bidang tanah yang terdaftar pada tahun 2018 sebanyak 352.889 bidang atau 95,11 persen,” kata Sutedjo.

■ qq/sf

Bendungan Watervang Penuh Anomali, Harus Segera Diselesaikan



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meninjau jaringan irigasi dan Bendungan Watervang di Lubuk Linggau Timur, Sumsel

Foto: Erlangga | HR

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menyatakan, Bendungan Watervang di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan memiliki banyak potensi yang bisa digali, namun juga mendapati beragam masalah yang belum terselesaikan. Menurutnya hal ini akan segera diselesaikan secepatnya, karena menyangkut kebutuhan primer masyarakat yang harus terpenuhi.

Hal ini ia sampaikan langsung kepada **Parlementaria** ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dalam rangka meninjau secara langsung jaringan irigasi dan Bendungan Watervang di Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Rabu (23/1).

“Di Lubuk Linggau ada irigasi yang kita ketahui namanya Watervang, ya sebagai irigasi andalan kita. Ini sejak 1941 belum pernah ada perbaikan-perbaikan. Tempat ini sangat strategis untuk cadangan beras kita secara nasional. Di sini mengairi ribuan lahan sawah di Musi Rawas, termasuk Lubuk Linggau juga. Akan tetapi Musi Rawas paling banyak,” jelas Edhy.

Ia menyampaikan masalah yang acapkali terjadi yaitu menyangkut sengketa siapa yang lebih berhak mendapatkan air yang berasal dari bendungan tersebut antara para petani dengan para penambak ikan. Maka dari itu, dalam kunjungan tersebut ia juga membawa beberapa mitra untuk membantu mediasi sengketa tersebut.

“Sebenarnya caranya sederhana yaitu komunikasi dua belah pihak, yang satu Kementerian Pertanian, yang satu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini sebenarnya hanya masalah komunikasi. Sudah kami sampaikan, tapi saya belum tahu kenapa sampai sekarang belum selesai. Saya harap setelah kunjungan ini tidak ada lagi jalan buntu,” imbuhnya.

Politisi Partai Gerindra ini menyebut sengketa serta perbaikan Bendungan Watervang ini harus segera diselesaikan dan dijadikan prioritas. Ia meyakini bahwa anggaran tidak akan menjadi masalah karena persoalan ini menyangkut apa yang menjadi kebutuhan primer di masyarakat.

“Kalau masalah waktu itu harus secepatnya. Toh anggaran ini yang penting kan prioritas. Kalau kita turunkan anggaran untuk ini, berapapun anggaran yang dibutuhkan, akan kembali berupa pangan buat negara, padi buat negara. Masyarakat yang tentunya akan dapat manfaat. Apalagi kalau ini ada nilai tambah untuk pariwisata,” jelas politisi dapil Sumsel I tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Edhy didampingi beberapa Anggota Komisi IV DPR RI antara lain Endro Hermono (F-Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (F-PKB), Mahfuz Sidik (F-PKS), dan Erislan (F-Hanura). Serta diikuti oleh beberapa mitra diantaranya Direktur Irigasi Pertanian, Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, serta Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. ■ **eps/sf**



Foto: Ria | HR

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana meninjau Bandar Udara Baru Tjilik Riwut di Palangka Raya, Kalteng

Tjilik Riwut Diharapkan Jadi Gerbang Pertumbuhan Ekonomi Kalteng

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana berharap, Bandar Udara Tjilik Riwut di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada Februari mendatang, dapat menjadi gerbang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kalteng.

Menurut legislator Partai Demokrat itu, sektor transportasi merupakan sarana dalam memperlancar roda perekonomian. Untuk itu perlu peran pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya dalam pemanfaatan bandara baru tersebut.

“Pengembangan penerbangan perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi mulai dari sarana prasarana penerbangan, metode, prosedur dan peraturan sehingga berdaya guna bagi kehidupan masyarakat,” ungkapnya usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik

Komisi VI DPR RI meninjau Bandar Udara Baru Tjilik Riwut di Palangka Raya, Kalteng, Kamis (24/1).

Bagi Azam, bandara merupakan bangunan gedung dengan fungsi khusus. Untuk itu, ia mengingatkan PT. Angkasa Pura II (Persero) untuk memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan jasa kebandarudaraan, kelestarian lingkungan, serta keterpaduan intermoda dan multi moda.

“Kami sudah keliling melihat bandara ini, kami sampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, Angkasa Pura II, dan

Kementerian Perhubungan. Bandara ini sudah pantas bertaraf internasional, ini harus dijaga untuk menumbuhkan perekonomian di Kalteng,” imbuh legislator dapil Jawa Timur itu.

Di tempat yang sama, Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI dapil Kalteng Hamdhani mengatakan, dirinya bangga dengan adanya bandara yang sangat representatif itu. “Sebagai putra Kalteng, tentu saya sangat senang adanya bandara ini. Semoga ini menjadi pintu masuk pertumbuhan ekonomi di Kalteng,” harap legislator Partai NasDem ini.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib. H. Said Ismail menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas kunjungan Komisi VI DPR RI ke Kalteng. Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat diperjuangkan.

“Kami berharap Komisi VI bisa memperjuangkan aspirasi kami mengenai jalur penerbangan ke daerah-daerah untuk menunjang pariwisata di Kalimantan Tengah,” jelasnya seraya menyampaikan apresiasi kepada Kemenhub dan PT. Angkasa Pura II yang telah mengakomodir kearifan lokal yang telah ditempatkan di Bandar Udara Tjilik Riwut. ■ rnm/sf

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono menilai ekspor ikan di Provinsi Sumatera Barat relatif masih sangat rendah. Mengacu data Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Padang, ekspor ikan di Sumatera Barat masih sebesar Rp 51 miliar per tahun dengan jenis ikan ekspor paling dominan ialah ikan tuna.

Untuk itu, pihaknya mendorong BKIPM Padang meningkatkan ekspor ikan. “Ekspor ikan di Sumatera Barat masih terbilang sedikit. Padahal jika melihat dari udara, begitu luas perairan di Sumbar. Tentunya memiliki potensi ikan yang begitu besar. Dan jika merujuk pernyataan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ekspor ikan di Indonesia mencapai ratusan juta dolar,” katanya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kantor BKIPM Padang, Sumatra Barat, Rabu (23/1).

Legislator Partai Golkar itu menyebutkan, secara nasional daerah yang terbesar mengekspor ikan berada di Tanjung Priok, Jakarta, Surabaya, Sumatera, dan Makassar. Sumatera Barat juga perlu terus didorong, agar ekspor ikan meningkat, karena wilayah ini memiliki laut yang cukup luas.

“Seiring dengan itu, BKIPM Padang juga perlu meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa ikan-ikan yang diekspor itu aman dan sehat untuk diekspor. Jika semuanya baik, kemungkinan Sumatera Barat memiliki permintaan ekspor ikan yang lebih besar,” harap legislator dapil Gorontalo itu.

Seiring dengan itu, BKIPM Padang juga perlu meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa ikan-ikan yang diekspor itu aman dan sehat untuk diekspor. Jika semuanya baik, kemungkinan Sumatera Barat memiliki permintaan ekspor ikan yang lebih besar

Komisi IV Dorong BKIPM Padang Tingkatkan Ekspor Ikan



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono memimpin Kunspek ke Kantor BKIPM Padang, Sumatra Barat

Untuk meningkatkan ekspor, harus ada stimulus berupa fasilitas kepada para nelayan Sumbar, sehingga dapat memberikan peran dalam ekspor ikan ke berbagai negara di dunia. Ke depan, pesan Roem Kono, tentu pemerintah perlu mendukung kegiatan para nelayan, sehingga hasil tangkapan nelayan turut meningkat, dan dengan demikian dapat menambah jumlah ikan yang hendak diekspor.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKIPM Rina mengatakan, tujuan ekspor ikan dari Sumbar didominasi ke Jepang, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Ekspor terbesar adalah ikan tuna. “Belum ada keluhan dari pihak luar negeri tujuan ekspor tentang kondisi ikan yang dikirim tersebut,” imbuh Rina.

Sementara itu, Kepala BKIPM Padang Rudi Barmara mengatakan, pihaknya berkomitmen memastikan ikan yang diekspor benar-benar dalam kondisi baik.

Laboratorium yang ada di BKIPM Padang telah memiliki akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Kami memberikan jaminan ikan yang dikirim sehat dan bermutu. Karena kami melakukan pengujian terlebih dahulu, sesuai dengan negara tujuan

Apalagi BKIPM sudah dilengkapi dengan berbagai laboratorium.

“Laboratorium yang ada di BKIPM Padang telah memiliki akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Kami memberikan jaminan ikan yang dikirim sehat dan bermutu. Karena kami melakukan pengujian terlebih dahulu, sesuai dengan negara tujuan,” yakin Rudi.

■ man/sf

Anggota Komisi IV DPR RI Kasriyah mengatakan kelompok tani yang memanfaatkan hutan sosial di Sungai Wain, Kota Balikpapan, ingin sekali mendapatkan bantuan berupa sumur bor guna mendapatkan air bersih.

Aliran air bersih dari PDAM, belum sampai ke rumah-rumah mereka. Selama ini, untuk mendapatkan air bersih, mereka terlebih dahulu harus menampung air hujan dan ketika sedang kemarau, mereka kembali kesulitan mendapatkan air bersih.

“Walaupun tidak dari APBN, saya kira Pemerintah Kota Balikpapan juga bisa untuk membantu menyiapkan untuk sumur bor di sini,” kata Kasriyah setelah menerima aspirasi dari Forum Komunikasi Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Sungai Wain, dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di KM 22, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (23/1).

Menurut legislator dapil Kalimantan Timur ini, masyarakat di sekitar Sungai Wain sudah mematuhi dan menjaga keutuhan lingkungan hutan yang merupakan paru-paru dunia ini. Untuk itu, sudah selayaknya pemerintah daerah turut memikirkan nasib masyarakatnya yang mayoritas petani ini untuk mendapatkan air bersih.

Selain itu, Kasriyah juga menyampaikan keluhan masyarakat Sungai Wain yang menginginkan pembangunan jalan beton di area hutan sosial untuk mengangkut hasil pertanian mereka dari dalam hutan. Kondisi

Petani Sungai Wain Harapkan Bantuan Sumur Bor



Foto: Eman | IHR

Komisi IV DPR RI menerima aspirasi Forum Komunikasi Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Sungai Wain, Kaltim

jalan tanah di dalam hutan Sungai Wain sendiri dikatakan Kasriyah sudah cukup parah, bahkan tak jarang sepeda motor petani terpeleket dan jatuh saat melewati jalanan tersebut.

“Saya sudah ke sana beberapa kali masuk hingga ratusan kilometer ke dalam hutan, memang mereka sangat butuh jalan. Di dalam itu, ada petani-petani salak, lada, dan lainnya. Mereka sangat berharap ada pembangunan jalan beton walaupun lebarnya hanya satu meter saja,” tandas

legislator Fraksi PPP itu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto mengatakan, tidak dibolehkan membangun jalan beton di area kawasan hutan lindung. “Pada area jalan yang rusak dan becek cukup diberi sirtu (pasir batu) saja. Kemudian dipadatkan agar tetap bisa lewat. Tidak boleh dibeton,” pungkas Bambang. ■ es/sf



Foto: Eko | IHR

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir

Anggaran Pembangunan Rusun untuk PTS dan Pesantren Perlu Ditingkatkan

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir meninjau rumah susun (rusun) untuk perguruan tinggi swasta (PTS) dan pesantren yang dibangun dengan anggaran negara di Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Menurut Ibnu, anggaran pembangunan rumah susun itu perlu ditingkatkan.

378 Desa Baru di Sumatera Teraliri Listrik

Anggota Komisi VI DPR RI Lily Asjudiredja mengapresiasi capaian Program Listrik Masuk Desa (LISSA) milik PT. PLN (Persero) di Sumatera. Diketahui, saat ini ada 378 desa baru yang teraliri listrik yang tersebar di seluruh Sumatera, artinya total rasio desa berlistrik PLN per 2018 mencapai 97,7 persen.

“Kami mengapresiasi program listrik masuk desa ini. Dengan menggunakan PMN, desa-desa yang bisa diterangi adalah desa yang berada di 3T yaitu, terdepan, terluar dan tertinggal,” kata Lily saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. PLN di Pekanbaru, Riau, Kamis (24/1).

Dalam kesempatan pertemuan dengan Direktur Bisnis PLN Regional Sumatera Wiluyo Kusdwiarto beserta jajaran itu, Lily menuturkan, dengan hadirnya infrastruktur ketenagalistrikan di desa-desa tersebut, maka dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup warga.

Ia juga berharap melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), program LISA dapat dibarengi dengan pemasangan atau instalasi listrik secara gratis untuk keluarga tidak mampu di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Dengan begitu, program ini diharapkan dapat mendukung target rasio elektrifikasi sekitar 97 persen pada tahun 2019.

“Kemarin dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Garut disampaikan bantuan penyambungan listrik. Mudah-mudahan juga di sini bisa dilaksanakan.

Sebab mereka punya keinginan, tetapi kalau tidak uang, yah susah juga,” ujar legislator Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Direktur Bisnis PLN Regional Sumatera Wiluyo Kusdwiarto mengatakan PMN sebesar Rp 6,5 triliun dalam APBN 2019 kepada PT. PLN sebagian akan digunakan untuk program LISSA dan proyek transmisi yang akan dimanfaatkan di tahun 2019 dan 2020.

“Ini adalah upaya *extraordinary* kami menuju Sumatera terang. Dimana kami

melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), program LISA dapat dibarengi dengan pemasangan atau instalasi listrik secara gratis untuk keluarga tidak mampu di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Dengan begitu, program ini diharapkan dapat mendukung target rasio elektrifikasi sekitar 97 persen pada tahun 2019.

Ibnu menyampaikan, kebutuhan rusun di seluruh Indonesia sangat tinggi. Namun ada kendala, berkenaan dengan keterbatasan dana, sehingga untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah susun untuk PTS dan pesantren masih sulit dipenuhi secara keseluruhan oleh pemerintah, karena itu pemenuhannya akan dilakukan secara bertahap.

“Artinya anggaran yang kita alokasikan untuk kepentingan pembangunan rusun ini ke depan perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan, sejalan tentu dengan peningkatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kita) kita,” ungkap Ibnu di sela-sela peninjauan rusun di Mataram, NTB, Rabu (23/1).

Penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk di dalamnya rusun untuk PTS dan pesantren juga menjadi prioritas pemerintah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 6.328 unit melalui pembangunan rusun, 180.000 rumah swadaya, 5.000 unit rumah khusus dan bantuan prasarana dan utilitas bagi 15.400 unit. Ibnu juga menyinggung, program pembangunan rusun juga memberikan peluang bagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi.

“Pembangunan rusun dengan anggaran yang terbatas, dengan nilai Rp 10 miliar penggunaan sampai Rp 9 miliar lebih,



Foto: Annel/HR

Anggota Komisi VI DPR RI Lily Asjudiredja

telah melakukan penyalaaan listrik di daerah 3T, sebagai salah satu contoh sebagian besar daerah di Kepulauan Riau dan 13 desa di Kabupaten Natuna, begitu juga pulau Mentawai dan Pulau Nias,” papar Wiluyo.

Ia mencatat, rasio desa berlistrik PLN (RD) di Aceh mencapai 99,9 persen, RD Sumatera Utara sebesar 97,2 persen, RD Sumatera Barat 98,6 persen, RD Jambi 95,3 persen, RD Bengkulu 99,6 persen, RD Sumatera Selatan 97,8 persen, RD Lampung 97,3 persen, RD Bangka Belitung 100 persen, RD Kepulauan Riau 81,5 persen, dan RD Riau 94,7 persen.

“Riau termasuk rendah karena memang kondisi alam di Riau yang terdiri dari sungai-sungai, ini salah satu kendala utama pembangunan desa berlistrik. Tetapi kami tetap targetkan rasio desa berlistrik di Riau ini mencapai 100 persen,” tandas Wiluyo. ■ *ann/sf*

memberikan satu peluang bagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi atau BUMN untuk memberikan partisipasi dan kerja kerasnya agar memberikan yang terbaik dalam menghasilkan bangunan,” jelas legislator Partai Golkar itu.

Pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan investasi berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2,5 triliun sebagai modal awal Tabungan Perumahan (Tapera) dan Rp 2,2 triliun kepada Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP) yang merupakan unit kerja di bawah Kementerian PUPR diperuntukan bagi peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan perumahan. ■ *eko/sf*

Komisi VI Dorong Sinergi Pengembangan Ekonomi Lhokseumawe

Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan menilai jika rekonstruksi industri di Lhokseumawe dan Aceh Utara sangat diperlukan untuk menggerakkan industri yang ada guna meningkatkan ekonomi dan menyejahterahkan rakyat.



Foto: Natasha | HR

Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan memimpin Kunspek ke Lhokseumawe, Aceh

Menurutnya, dibutuhkan sinergi dan dukungan dari seluruh pihak, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten/kota dalam menyelesaikan masalah rendahnya geliat dunia usaha di Provinsi Aceh, khususnya Kota Lhokseumawe.

Hal tersebut disampaikan Zulfan Lindan saat memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT. Pelindo I (Persero), Direksi PT. Pupuk Indonesia (Persero), Direksi PT. Pupuk Iskandar Muda, dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe, dengan agenda membahas permasalahan operasional perusahaan, serta minimnya pengembangan industri dan investasi di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (24/1).

“Nah ini memang perlu anggaran khusus ya, kalau tidak Aceh ini makin lama akan makin terbengkalai. Ini tentu akan

merugikan semua pihak, tapi yang paling dirugikan adalah rakyat, karena mereka tidak bisa mengembangkan aktivitas pertanian, aktivitas industri mereka, UMKM, dan lain-lain karena minimnya sarana dan prasarana penunjang untuk mengembangkan kemampuan mereka di dalam membangun dunia usaha,” terang Zulfan.

Politisi Partai NasDem ini menyatakan, Komisi VI DPR RI siap untuk memfasilitasi dengan memberikan dukungan baik dari segi teknis, konsep, ataupun anggaran untuk seluruh program yang direncanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun hal itu dapat terjadi jika ada kemauan serius dari pihak pemerintah.

“Hal ini memang harus disampaikan secara terkonsep dengan baik. Ini penting sekali agar semua pihak dapat menangkap *opportunity* yang ada di

wilayah Aceh, khususnya Aceh Utara dan Lhokseumawe misalnya, untuk mengembangkan dunia usaha. Kalau itu tidak ada ya susah. Makanya di sini kita lihat apa fungsi Kadin? Jangan hanya bergerak di sektor konstruksi, bangun jalan, bangun gedung perumahan, tetapi harus lebih inovatif,” tegas Zulfan.

Politisi dapil Aceh II ini pun mengajak seluruh pihak baik kementerian atau lembaga dan himpunan pengusaha, serta pihak swasta untuk saling bersinergi dalam mencari solusi atas masalah ini. Sinergi dinilai olehnya penting, sebab apapun keinginan atau hambatan yang terjadi di pemerintahan dan di masyarakat dapat diselesaikan bersama.

Kedatangan Komisi VI DPR RI ke Aceh diapresiasi oleh Wakil Wali Kota Lhokseumawe Yusuf Muhammad. Ia menyampaikan harapannya kepada Komisi VI DPR RI agar dapat menjembatani keinginan masyarakat Kota Lhokseumawe untuk membangun perekonomian yang lebih baik untuk ke depan. Salah satunya membuat pintu masuk ke Lhokseumawe melalui tol laut yang menghubungkan Kota Lhokseumawe dengan Penang.

“Kami membutuhkan dukungan dan kebijakan yang selama ini dipegang

Komisi VI DPR RI siap untuk memfasilitasi dengan memberikan dukungan baik dari segi teknis, konsep, ataupun anggaran untuk seluruh program yang direncanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun hal itu dapat terjadi jika ada kemauan serius dari pihak pemerintah.

oleh Sumut agar dikembalikan ke Aceh. Dan kita juga butuh dukungan dari Pelindo I agar tidak mengalirkan barang keluar Aceh, bukalah pintu masuk ke Lhokseumawe. Ada isu juga disampaikan di luar, kalau Aceh dibuka, keran ekspor impor akan ada penyelundupan. Itu tidak mungkin terjadi karena ada *security* di sini dan kita jaga semua. Kita perlu bangun *trustholding* bahwa Aceh aman, Aceh bukan tempat penyelundupan, dan Aceh bukan tempat transit narkoba,” tegas Yusuf. ■ **nap/sf**

Hal tersebut diungkapkan Ace usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita beserta jajarannya, guna memastikan penanganan pasca bencana di Tanjung Lesung, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang yang berlangsung di Ruang Pendopo Bupati Pandeglang, Banten, Kamis (24/1).

“Kami tahu bahwa rehabilitasi dengan rekonstruksi pasca bencana itu bukan hanya kewenangan satu badan saja, tetapi membutuhkan integrasi kebijakan antar kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, kami ingin mendapatkan data dan usulan yang dibutuhkan oleh Pemkab Pandeglang, supaya proses rehabilitasi dan rekonstruksinya bisa berjalan secepat mungkin. Kami akan memperjuangkannya juga mengawalinya di Komisi VIII,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Ace, yang paling penting dari seluruh proses pemulihan ini adalah bagaimana memulihkan sektor infrastruktur, ekonomi dan kepastian kehidupan masyarakat terdampak. Mengingat, kehidupan Pandeglang bergantung pada sektor pariwisata, maka semua ini harus dicari solusi terbaiknya, sehingga masyarakat Pandeglang yang terdampak bencana dapat hidup seperti sedia kala, nyaman, tenang dan bisa beraktifitas normal kembali.

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan menurut legislator Partai Golkar itu adalah bagaimana penanganan untuk memulihkan trauma. Menurutnya layanan psikososial untuk *trauma healing* sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang terdampak tsunami Selat Sunda tersebut, agar dapat dipastikan rasa traumanya dapat dipastikan pulih.

“Menurut saya itu hanya bisa dilakukan kalau memang pemerintah terutama Kemensos juga mampu untuk mendorong supaya psikososialnya juga dibangkitkan. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Kemensos, BNPB dan pihak-pihak lain yang terkait begitu sangat cepat dilakukan responnya,” apresiasi legislator dapil Banten itu.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku sangat bersyukur dengan adanya kunjungan dari Komisi VIII DPR RI. Pihaknya berharap, Komisi VIII DPR RI dapat membantu merealisasikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat Pandeglang dengan cepat, yaitu pembangunan rumah hunian sementara (Huntara). Mengingat, menurut Irna, pada fase pemulihan ini justru fase yang paling berat secara biaya.

Komisi VIII Soroti Pemulihan Pandeglang Pasca Bencana

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily akan menindaklanjuti hasil peninjauan perkembangan penanganan bencana di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mengingat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi antar masing-masing lembaga terkait.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily

“Mungkin bisa lebih dipersingkat untuk penanganan realisasi usulan-usulan kami di fase pemulihan ini. Karena yang lebih berat dan biayanya yang lebih besar adalah di fase pemulihan ini. *Recovery* ini karena masyarakat ada sebagian yang tidak paham, mereka tidak tahu prosedur, tidak tahu teknis seperti apa untuk pencairan ini. Mereka hanya mengharapkan segera ingin ditangani dengan adanya bantuan dibangun rumah hunian sementara,” ungkapnya.

Irna sangat berharap kehadiran Komisi VIII DPR RI dapat bantu mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan dana *on call* atau dana siap pakai sebesar Rp 6,5 triliun yang diperuntukkan untuk seluruh Indonesia, dengan menetapkan berapa bagian yang dikhususkan untuk Pandeglang. Dari

usulan Pemkab Pandeglang sendiri untuk pembangunan Huntara sekitar Rp 13 miliar.

“Usulan kami memang Rp 13 miliar untuk Huntara. Mudah-mudahan ini bisa segera selesai, sehingga kami menyiapkan lahannya sudah ada Huntara. Dan masyarakat dalam kurun waktu sebelum Ramadhan sudah bisa menempati Huntara. Selama ini mungkin ada kekurangan fasilitas air bersih, sanitasi, makan yang kurang nyaman di tempat pengungsian,” katanya.

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Pandeglang ini, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher (F-PAN), dan Anggota Komisi VIII DPR RI Wenny Haryanto (F-PG), Anda (F-Gerindra), Bisri Romli (F-PKB), Ei Nurul Khotimah (F-PPS), Lukman Hakim Hasibuan (F-PPP), dan Dja'far Shodiq (F-NasDem). ■ **ndy/sf**

Revitalisasi BLK Solusi Kurangi Pekerja Anak

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ichsan Firdaus menilai revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) bisa menjadi solusi dalam mengurangi jumlah pekerja anak di Indonesia. Jadi, lanjut Ichsan, anak yang memiliki minat dan bakat yang baik, bisa dikembangkan melalui pendidikan informal di BLK yang diubah menjadi sebuah rumah kreatif.

Hal itu diungkapkan Ichsan usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Jateng, Kepala Dinas PPPA Jateng, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jateng, Ketua APINDO dan LSM Yayasan Setara Semarang di Kantor Disnakertrans, Semarang, Jateng, Selasa (29/1).

“Banyak anak yang telah ditarik untuk mendapat pendidikan formal. Namun, setelah dikembalikan ke orang tua, ia kembali lagi menjadi pekerja. Maka dari itu, BLK yang diubah menjadi rumah kreatif saya pikir bisa menjadi solusi bagi mereka untuk mengembangkan minat dan bakat di pendidikan informal,” ungkap Ichsan.

Selain dapat mengurangi pekerja anak, menurut legislator Partai Golkar itu, revitalisasi BLK juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja



Wakil Ketua Komisi IX DPR Ichsan Firdaus

Indonesia dengan tenaga kerja negara lain. Revitalisasi pendidikan dan pelatihan di BLK bertujuan menyelaraskan kompetensi

yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha.

“Salah satu cara revitalisasi BLK itu adalah dengan meningkatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman. Saya berharap kelengkapan BLK yang sudah ada terus di-upgrade supaya tidak ketinggalan zaman, dan tentunya sesuai kebutuhan industri yang ada,” harap legislator dapil Jawa Barat itu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng Wika Bintang menyampaikan dalam mengurangi pekerja anak pihaknya gencar melakukan Pengurangan Pekerja Anak - Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). PPA-PKH adalah kegiatan menarik anak yang putus sekolah dan bekerja untuk dikembalikan ke dunia pendidikan atau pelatihan keterampilan melalui pendampingan di shelter.

Wika mengungkapkan, saat ini, ada sekitar 600 anak yang mendapat pendampingan di shelter yang dilaksanakan di 6 kabupaten dan kota yang berada di lima wilayah satuan pengawasan ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jateng.

Turut hadir dalam Kunspek Komisi IX DPR RI ke Semarang ini antara lain Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso, Dewi Aryani, dan Nursuhud dari F-PDI Perjuangan, Delia Pratiwi (F-Golkar), Suir Syam (F-Gerindra), Zulfikar Achmad (F-Demokrat), M. Hanafi (F-PAN), Mafirion (F-PKB), Adang Sudrajat (F-PPS), Kartika Yudistri (F-PPP) dan Ali Mahir (F-NasDem).

■ rnm/sf

Komisi X Ingatkan Pemerintah Terkait Kekurangan Guru

Komisi X DPR RI mengingatkan pemerintah terkait urgensi kekurangan tenaga guru. Pasalnya, berdasarkan paparan Eselon I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI dalam RDP tanggal 28 Januari 2019 tercatat permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 200 ribu lebih.

Tentu, hal ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah harus punya kesiapan atas masalah ini. Jika tidak, akan terjadi darurat guru.

“Jika pemerintah tidak memprioritaskan penyelesaian tenaga guru, kita akan mengalami darurat guru.

Pemerintah harus memperhatikan hal ini secara serius. Kalau tidak, mau dibawa ke mana bangsa dan negara ini,” kata Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komisi X DPR RI ke Universitas Negeri Medan (UNIMED), Sumatera Utara, Selasa (29/1).



Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto

Lebih lanjut ia memaparkan, permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan saat ini merupakan hal yang krusial dunia pendidikan di Indonesia, diantaranya tentang seleksi guru, sebaran guru, pembinaan karir guru. Selain itu,

Komisi IX DPR RI menemukan masih banyak pekerja anak di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya pada sektor informal. Untuk itu, Anggota Komisi IX DPR RI Nurmansyah Efendi Tanjung meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengawasan kepada pekerja anak, selain pada sektor formal juga di sektor informal.

“Komisi IX minta pengawasan pekerja anak ini harus sampai di sektor informal. Karena, banyak sekali pekerja anak yang menurut kami dipekerjakan, dan ini luput dari pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja,” katanya di sela-sela rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BPJS Ketenagakerjaan, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA) dan Apindo, di Kantor Disnakertrans Sumsel, Palembang, Selasa (29/1).

Rapat yang digelar dalam rangka pengawasan mengenai perlindungan terhadap pekerja anak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terungkap data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TN2P2K), bahwa Provinsi Sumatera Selatan

guru menjelang pensiun tahun 2018-2019, serta guru honorer dan guru kontrak yang membutuhkan penyelesaian secara cepat dan tepat.

“Salah satu indikator untuk meningkatkan standar nasional pendidikan yaitu dengan menciptakan kesiapan tenaga pendidik untuk mengajar, meski masih ada beberapa kendala. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya anggaran. Maka dari itu, Panja akan mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar kepada Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) sehingga kita dapat memiliki guru yang kompeten

“Kami mau meningkatkan standar nasional pendidikan (SNP) di Tanah Air. Kami mau kompetensi guru jangan hanya mempunyai kualitas mengajar tetapi harus bisa mendidik,” tandas politisi Partai Demokrat ini.

Djoko meminta jajaran dan civitas akademika UNIMED berperan serta

Komisi IX Minta Pemprov Sumsel Awasi Pekerja Anak Sektor Informal

merupakan provinsi dengan jumlah pekerja anak tertinggi ke-tiga di Pulau Sumatera, setelah Sumatera Utara dan Lampung, dengan jumlah yaitu sebanyak 2.800 pekerja anak.

Legislator PDI-Perjuangan ini menjelaskan, data yang disampaikan oleh Pemprov Sumsel melalui dinas-dinas tersebut bahwa di Sumsel ini tidak ditemukan pekerja anak yang dipekerjakan di sektor formal. Akan tetapi, menurutnya pekerja anak ini lebih banyak di sektor informal sebagai contoh misalnya banyak pekerja anak itu dipekerjakan di warung-warung atau di restoran-restoran. Pada umumnya mereka bekerja yang usianya 16 tahun kemudian ini yang tidak dilaporkan.

“Menurut kami, banyak sisi-sisi yang

“**Nah Rumah Pintar inilah yang nantinya akan disebar ke seluruh Indonesia, dan ini nantinya menjadi menampung anak-anak kita. Anak-anak bangsa ini yang putus sekolah...**

membangun dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, khususnya terkait pemenuhan standar pengelolaan, pendidikan dan tenaga kependidikan.

Ia juga mengisyaratkan bahwa perlu dilakukan revisi total terhadap Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen. Selain itu, juga perlu dilakukan harmonisasi di antara UU yang telah ada. Sehingga, bisa memberikan kesempatan kepada para profesor yang ada di perguruan tinggi untuk mengadakan penelitian dengan dana cukup.

“Kami harap, bapak dan ibu bisa memberikan masukan berupa data dan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan permasalahan pendidikan dasar, menengah juga perguruan tinggi yang terbaru hal ini berguna untuk masukan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komisi X DPR RI,” harapnya. ■ **man/sf**



Anggota Komisi IX DPR RI Nurmansyah Efendi Tanjung

tidak terawasi oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan ini. Nah ini perlu menjadi perhatian dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya di Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan. Jadi saya tegaskan, ini perlu tindak lanjut pengawasan ini bagi tindak lanjut pekerja anak,” paparnya.

Hal ini dalam upaya menekan angka pekerja anak dan percepatan Program Indonesia Bebas Pekerja Anak pada Tahun 2022 serta BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya memberikan perlindungan bagi pekerja anak dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Nurmansyah mengapresiasi program-program dari pemerintah sekarang ini sudah dilakukan, dalam rangka mengantisipasi pekerja anak atau usia sekolah itu tidak bekerja. Mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan 12 tahun, selain itu, sekarang ini dari Kementerian Ketenagakerjaan pun sedang menyiapkan Rumah Pintar.

“Nah Rumah Pintar inilah yang nantinya akan disebar ke seluruh Indonesia, dan ini nantinya menjadi menampung anak-anak kita. Anak-anak bangsa ini yang putus sekolah, mereka kemudian mendapatkan pendidikan di rumah pintar. Ini salah satu program pemerintah yang menurut kami perlu didorong dan diawasi secara baik, sudah ditetapkan dan diputuskan oleh DPR,” pungkask wakil rakyat dapil Jawa Barat V ini.

■ **as/sf**

Pemanfaatan EBT Butuh Payung Hukum

Potensi sumber energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia sangat besar. Namun hingga kini, pemanfaatan potensi EBT masih minim. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengatakan, dibutuhkan payung hukum untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi EBT di Tanah Air.

Hal ini diungkapkan Ridwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Universitas Brawijaya (UB) Malang dalam rangka menyerap aspirasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) dari kalangan akademisi, di UB Guest House, Malang, Jawa Timur, Selasa (29/1).

Legislator Partai Golkar ini menjelaskan, pemanfaatan EBT sudah sejalan dengan amanat tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana telah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam

Indonesia tahun 1945 dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

“Amanat ini juga sejalan dengan makna pasal 33 ayat 3 UUD tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelas Ridwan.

Dalam acara *Focus Grup Discussion* pembahasan RUU EBT ini melibatkan rektor dan civitas akademika 17 perguruan tinggi se-Malang raya. Politisi dapil Jawa Timur ini menjelaskan tujuan dan ruang lingkup pengaturan RUU EBT sangat berkaitan dengan Insan akademis, peneliti, ilmuwan, serta *stakeholder* lainnya.

“Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI memandang penting untuk menyerap aspirasi menerima masukan serta pemikiran RUU dimaksud. Masukan ini sangat penting dan akan menjadi referensi serta pertimbangan bagi Komisi VII DPR RI dalam proses penyusunan dan pembahasan nantinya bersama pemerintah,” papar Ridwan.

■ eko/sf

Foto: Eko | HR

Kekurangan Guru Harus Jadi Perhatian Pemerintah

Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat meminta pemerintah untuk fokus menyelesaikan persoalan kekurangan guru yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Aspirasi ini ia peroleh setelah mendengar aduan dari Kepala Dinas Pendidikan, Rektor, Kepala Sekolah serta serikat guru di Provinsi Sumatera Barat yang mengeluhkan kurangnya tenaga pengajar dan minimnya honor yang diterima.

“Kami menerima masukan dari forum guru, kepala dinas serta rektor Universitas Negeri Padang (UNP). Saya kira masukan ini kita kumpulkan dengan baik. Nanti akan kita tindaklanjuti persoalan yang terkait dengan kekurangan guru, kemudian kekurangan guru dari ASN di masing-masing sekolah,” ujar Mujib saat memimpin pertemuan

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan mitra kerja terkait di UNP, Sumbar, Selasa (29/1).

Selain itu Mujib juga menyoroti tentang kualitas guru yang perlu dilakukan peningkatan. Baik dari segi pengajaran serta metode yang digunakan untuk mendidik para siswa. UNP selaku kampus yang menghasilkan banyak tenaga kependidikan diharapkan mampu untuk mencetak guru profesional



Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat

Foto: Hendra | HR

melalui pendekatan-pendekatan yang kekinian.

“Kedua adalah soal mutu kualitas guru dan kualitas guru, ini terkait dengan produksi dari yang menciptakan guru dan UNP ini salah satu yang mencetak guru. Ini perlu ada upaya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita sadari kualitas guru itu jauh lebih penting dibandingkan daripada materi pelajaran kurikulum dan



Foto Oji/sf

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah memimpin Tim Kunspek meninjau SMP Katolik St Rafael Manado

Penarikan Guru PNS dari Sekolah Swasta Jangan Terburu-buru

metodologinya. Itu jadi konsen kita sekarang,” terang Mujib.

Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti terkait dengan gaji para guru yang masih jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk lebih bisa mensejahterakan para guru terutama guru honorer, guna menjaga motivasi para guru dalam mengajar. Namun jangan sampai motivasi guru dalam mengajar ini berubah menjadi untuk meningkatkan kesejahteraan bukan pengabdian.

“Gaji itu adalah bagian yang memotivasi. Salah satu perangkat untuk meningkatkan gaji adalah sertifikasi melalui uji kompetensi. Itu juga melalui *merit system* jika dia kerja dengan baik dalam waktu yang cukup memadai dia akan mendapat *salary* yang lebih besar, ini juga memotivasi para guru. Saya ingatkan jangan sampai orientasi jadi berubah. Yang tadinya semangat mengajar jadi semangat membangun kesejahteraan pribadinya,” tegas Mujib. ■ **hs/sf**

Penarikan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sekolah swasta jangan dilakukan terburu-buru karena menimbulkan efek kegaduhan di daerah-daerah. Pihak sekolah masih butuh waktu untuk melakukan persiapan terkait kebijakan pemerintah pusat yang sedang berupaya melakukan pemetaan distribusi guru PNS di sekolah-sekolah swasta.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komisi X DPR RI meninjau SMA Katolik ST. Thomas Aquino Manado, di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (29/1).

Politisi Partai Golkar ini menambahkan Tim Panja memperoleh masukan terkait dampak dari penarikan guru-guru PNS dari sekolah swasta, antara lain mempengaruhi pembiayaan sekolah dalam skema penggajian. “Ini efeknya sekolah swasta mau tidak mau menaikkan biaya pendidikan untuk menutupi operasional gaji guru-gurunya,” imbuhnya.

Kedua, kompetensi guru PNS yang sudah tersedia tidak serta-merta bisa digantikan oleh guru baru yang notabene belum memiliki standar kompetensi sesuai kebutuhan sekolah. Dan ketiga, kualitas guru-guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta masih diperlukan untuk menjaga meningkatkan standar kompetensi pendidikan di sekolah tersebut.

“Uji kompetensi yang akhirnya mengarah kepada sertifikasi harus dibuat periodik. Bagaimana selanjutnya seperti kita memperpanjang SIM (Surat Izin Mengemudi). Karena kompetensi itu harus dilihat dan ditinjau melalui sistem perodesasi. Tidak ada profesi apapun ketika sudah mendapatkan sertifikasi lalu tidak ada tinjauan ulang di kemudian hari karena perlu evaluasi setiap perodesasinya,” tandas legislator dapi Jawa Barat XI ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Grace Punuh menjelaskan total guru sekolah swasta di Provinsi Sulawesi Utara sekitar 2300 sekolah, dimana 1200 diantaranya adalah guru PNS. Jika ini ditarik maka sekolah swasta akan kesulitan anggaran jika harus menggaji seluruh penggantinya.

“Beri kami waktu minimal 5 tahun sebagai masa persiapan dan transisi agar tidak mengganggu standar mutu pendidikan dan pelayanan sekolah,” ungkap Grace meneruskan aspirasi para pengelola sekolah swasta di Manado.

“Karena kompetensi itu harus dilihat dan ditinjau melalui sistem perodesasi. Tidak ada profesi apapun ketika sudah mendapatkan sertifikasi lalu tidak ada tinjauan ulang di kemudian hari karena perlu evaluasi setiap perodesasinya.”

Saat ini, standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulut mencapai Rp 3.050.000 dan secara bertahap Pemprov Sulut sedang merealisikannya. Juga terus dibangun bank data guru, sebagai terobosan mengatasi masalah kekurangan guru agar tidak ada yang kelebihan dan kekurangan di wilayah tertentu.

“Guru yang sudah pensiun tapi secara fisik masih layak dan sanggup mengajar sebaiknya tetap diberdayakan sambil menunggu proses regenerasi berikutnya,” pungkasnya. ■ **oji/sf**

Komisi VII Himpun Masukan RUU EBT di Unhas

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI menghimpun masukan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) di Universitas Hasanuddin (Unhas). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung mengatakan, penyusunan RUU ini fokus pada laju pertumbuhan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) agar tidak ketinggalan jauh dengan penggunaan EBTKE rata-rata dunia sebesar 9 persen.

“Sementara ini penggunaan EBTKE kita masih pada angka 2 sampai 3 persen. Kita himpun masukan dari akademisi agar dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengelolaan energi EBTKE kita ke depan,” kata Tamsil usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI usai pertemuan dengan para rektor, akademisi dan *stakeholder* terkait di Unhas, Makassar, provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (30/1).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar akselerasi pertumbuhan penggunaan EBTKE di Indonesia bisa mengejar ketertinggalan penggunaan EBTKE di dunia. Hal ini sebagaimana komitmen yang tertuang pada *Conference of Parties 21 (COP21)* yang menjadi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim.

“Saya kira kalangan akademisi sangat memahami ini. Karena itu dia bisa memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat tentang bagaimana mengelola energi EBTKE ini dengan tahapan-tahapan yang konkrit menuju pada peningkatan laju pertumbuhan energi primer ini,” jelas Tamsil.

Meskipun dari sisi perekonomian EBTKE jauh lebih mahal jika dibandingkan

EBTKE ini tentu harus dilihat juga dalam perspektif yang tidak diarahkan untuk mensubsidi energi fosil. Karena itu saya kira memang harus ada peran dan komitmen dalam hal penganggaran untuk memberikan kemudahan di dalam implementasi EBTKE.



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung

Foto: Tiara IHR

dengan energi konvensional lain, politisi daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan ini memandang perlunya pandangan dan perspektif yang lebih komprehensif, khususnya dari sisi aspek lingkungan yang dihasilkan.

“Saya kira EBTKE ini tentu harus dilihat juga dalam perspektif yang tidak diarahkan untuk mensubsidi energi fosil. Karena itu saya kira memang harus ada peran dan komitmen dalam hal penganggaran untuk memberikan kemudahan di dalam implementasi EBTKE. Sebagai upaya terobosan inilah penyiapan perangkat kerangka hukum yang komprehensif dalam pengembangan

energi diharapkan dapat menjadi pengembangannya,” tandas Tamsil.

Untuk itu melalui pertemuan ini, Tamsil berharap adanya isu-isu strategis khususnya terkait adanya insentif EBTKE yang nantinya dapat disinergikan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini agar EBTKE bisa lebih kompetitif dengan energi konvensional lain demi mewujudkan keadilan.

“Ini perlu kita pertimbangkan, jangan sampai kita berkesimpulan bahwa energi fosil lebih efisien dan ramah lingkungan. Padahal sesungguhnya EBTKE ini merupakan investasi jangka panjang yang

harus sama-sama disepakati, agar bukan semata-mata aspek perekonomian saja yang menjadi pertimbangan. Tapi juga harus dilihat dalam aspek *externality cost* dan aspek lingkungan yang juga sangat penting,” imbuh Tamsil.

Pada kesempatan yang sama Rektor Unhas Dwia Aries Tina Pulubuhu dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen antar *stakeholder* untuk meningkatkan penggunaan EBTKE ke depan. “Saya percaya dengan adanya UU ini nantinya aksi bersama, sosialisasi, gerakan dan penyadaran terhadap penggunaan EBTKE itu bisa menjadi tugas kita bersama,” jelasnya. ■tra/sf

Kinerja Kanwil Bea Cukai Sumbar Diapresiasi

Penyelundupan berkurang, target penerimaan tercapai, dan penegakan hukum telah dilakukan. Inilah kinerja Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Barat. Sinergitas dengan kantor Bea dan Cukai lainnya juga sudah terkonsolidasi dengan baik. Berbagai kinerja Kanwil Bea dan Cukai Sumbar ini pun mendapat apresiasi dari Komisi XI DPR RI.

“Dari sisi penerimaan negara, saya kira Sumatera Barat sudah menunjukkan pagu yang sesuai dengan anggaran yang mereka rencanakan tahun sebelumnya. Kita melihat penyelundupan di sini sudah banyak berkurang sejak konsolidasi di pantai barat diperkuat,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR

RI dengan Kepala Kanwil Bea dan Cukai Sumbar di Padang, Sumbar, Senin (28/1).

Politisi PAN ini mengapresiasi capaian yang dihasilkan Bea dan Cukai setempat untuk meraih penerimaan dan menekan kerugian negara. Dalam pertemuan tersebut terungkap, setidaknya ada 19 ribu batang rokok ilegal berhasil digagalkan. Mengomentari hal ini, Hafisz

mengatakan, maraknya penyelundupan rokok ilegal karena ada disparitas harga yang tinggi dengan negara-negara sahabat.

“Saya kira ini akan tetap dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyelundupkan rokok ilegal. Kami mendukung penuh Bea Cukai untuk memperkuat kesatuan dalam memerangi permainan pedagang yang tidak mengindahkan cukai tersebut,” tandas Hafisz.

Aksi penegakan hukum, sambung legislator dapil Sumatera Selatan I ini, memang harus dilakukan Bea Cukai untuk menyelamatkan kedaulatan negara dari sisi pendapatan cukai. Wilayah kerja Kanwil Bea Cukai Sumbar meliputi Sumatera bagian barat, selain Sumbar sendiri juga Bengkulu dan Lampung.

“Kalau kami melihat dari sisi kinerja Sumbar, Bengkulu, dan Lampung sudah menunjukkan kinerja yang membaik. Kita apresiasi Kakanwil, mudah-mudahan kinerjanya bisa dipertahankan supaya megara kita terlindungi” tutupnya. ■ mh/sf



Foto: Husen | HR

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir meninjau Pelabuhan Teluk Bayur di Padang, Sumbar

Ahmadi memaparkan, dalam siaran pers BPK Perwakilan Kaltim pada 5 Desember 2018 disebutkan bahwa hasil pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) BPK sampai dengan Semester 1 Tahun 2018 menunjukkan adanya rekomendasi sebanyak 9052 dari 3934 temuan pemeriksaan. Kualifikasi penyelesaian dari temuan pemeriksaan itu sebanyak 80 persen sesuai dengan rekomendasi.

“Sementara 16,35 persen belum sesuai dengan rekomendasi, 2,82 persen belum ditindaklanjuti, dan 0,83 persen tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah,” kata Ahmadi, dalam sambutannya saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Kepala BPK Perwakilan Kaltim beserta jajaran, di Balikpapan, Kaltim, Senin (28/1).

Sedangkan, tambah legislator Partai Golkar itu, hasil pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah (PPKN/D) Semester I Tahun 2018 yang dilakukan BPK Perwakilan Kaltim menunjukkan bahwa total kerugian daerah yang dipantau sebesar Rp 223,250 miliar, dimana sebesar 43,61 persen sudah diselesaikan, 10,24 persen dalam proses angsuran, 1,91 persen telah dihapuskan, dan 44,23 belum diselesaikan.

Menanggapi hal itu, Kepala BPK Perwakilan Kaltim Raden Cornell Syarif mengatakan, ada sejumlah permasalahan yang sering menjadi kendala pihaknya dalam melakukan pengawasan. Diantaranya, tata kelola administrasi keuangan oleh entitas atau pemerintah daerah yang belum tertib. Sulitnya untuk menjangkau wilayah entitas juga belum didukung sarana transportasi dan jaringan telekomunikasi yang memadai.

“Selain itu, masih ada kurangnya komitmen entitas atau pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dan melakukan penyelesaian tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK serta laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara,” jelas Cornell.

Cornell menambahkan, sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017, dari 11 entitas di Kaltim, 9 entitas mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 2 entitas mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Permasalahan 2 entitas yang mendapat opini WDP

Komisi XI Pantau Kinerja BPK Perwakilan Kaltim

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI dipimpin Anggota Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supit memantau kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Pemantauan ini guna mendapatkan gambaran mengenai upaya yang telah dilaksanakan, termasuk hambatan dan kendala, dan berbagai langkah yang telah dilakukan BPK Perwakilan Kaltim, sehingga menjadi landasan BPK Perwakilan Kaltim dalam menentukan rencana aksi selanjutnya.



Anggota Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supit memimpin Tim Kunspek ke Provinsi Kalimantan Timur

ini diantaranya karena penatausahaan tidak memadai, belum adanya titik temu besaran nilai utang belanja antara

pemerintah daerah dengan penyedia jasa, dan penatausahaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak memadai.

**”
Permasalahan 2 entitas yang mendapat opini WDP ini diantaranya karena penatausahaan tidak memadai, belum adanya titik temu besaran nilai utang belanja antara pemerintah daerah dengan penyedia jasa ...**

Selain memantau kinerja BPK Perwakilan Kaltim, dalam kesempatan ini Tim Kunspek Komisi XI DPR RI juga menyerap aspirasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Kunspek ini juga diikuti sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI, diantaranya Eva Kusuma Sundari dan Michael Jeno dari F-PDI Perjuangan, Agun Gunandjar Sudarsa dan Mukhamad Misbakhun dari F-Golkar, Syaiful Rasyid (F-Gerindra), Didi Irawadi Syamsudin dan Tutik Kusuma Wardhani dari F-Demokrat, Ecky Awal Mucharam (F-PKS), serta Amirul Tamim (F-PPP). ■ sf



Foto: Singih I HR

Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf usai memimpin FGD membahas persiapan WPFSD ke-3

DPR Harus Terlibat Perumusan VNR on SDGs

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyerukan pentingnya keterlibatan DPR RI dalam proses perumusan *Voluntary National Review (VNR) on Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Review Nasional Sukarela atas capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

“Hasil survey VNR pada *Inter Parliamentary Union (IPU)* Tahun 2018 terdapat 69 persen parlemen yang belum dilibatkan dalam *national review* yang dilakukan oleh pemerintah,” kata Nurhayati usai memimpin *Focus Group Discussion (FGD)* membahas persiapan *World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)* ke-3, Selasa (29/1).

Legislator Partai Demokrat itu menambahkan, dalam VNR yang disampaikan Pemerintah Indonesia pada 2017 lalu, DPR RI tidak dilibatkan sama sekali dalam penyusunannya. Seharusnya proses perumusan VNR yang dilakukan pemerintah hendaknya melibatkan DPR RI.

“Hal ini mengacu Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* yang menekankan bahwa parlemen adalah salah satu pemangku

kepentingan yang berperan penting dalam implementasi SDGs di setiap negara,” tambah legislator dapil Jawa Timur V itu.

Nurhayati juga menyampaikan bahwa DPR RI berencana akan kembali mengadakan Konferensi Forum Parlemen sedunia untuk WPFSD ke-3 pada September 2019 mendatang. Untuk menentukan tema yang akan diangkat pada forum tersebut, BKSAP mengadakan FGD dengan mengundang Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional.

“Diskusi ini menghasilkan pemahaman bersama mengenai kemajuan dan pencapaian Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Lebih lanjut, dalam WPFSD ke-3 mendatang, Indonesia akan menawarkan tema : *Combating inequality through social and economy inclusion*,” terang Nurhayati.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI

itu, tema ini erat kaitannya dengan *goal 8* (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi), *goal 10* (berkurangnya kesenjangan), *goal 13* (penanganan perubahan iklim), *goal 16* (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh), dan *goal 17* (kemitraan untuk mencapai tujuan).

Dalam pertemuan tersebut, kemajuan atau progres dari pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menempatkan Indonesia sebagai enam negara terbaik dalam perumus VNR. “Kemajuan ini juga tidak lain berkat dari dukungan dan kerja sama DPR dengan Pemerintah dalam mendorong akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” pungkask legislator dapil Jawa Timur V itu.

WPFSD merupakan forum tahunan parlemen yang diinisiasi oleh DPR RI sejak tahun 2017. Forum ini dikhususkan untuk bertukar praktik cerdas dan ide antar parlemen dunia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Hadir pada FGD tersebut Anggota BKSAP DPR RI lainnya yakni Achmad Fahrial (F-PPP), Jerry Sambuaga (F-Golkar). Sedangkan Kemenlu diwakili oleh Direktur Perdagangan, Komoditi dan Kekayaan Intelektual Tri Purnajaya, serta dari Kementerian PPN/BAPPENAS diwakili oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudiyanto. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian PPN/BAPPENAS adalah *vocal point* Indonesia untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

■ es/sf

Ittama DPR Dorong Implementasi Lima Aksi Open Parliament

Inspektorat Utama (Ittama) DPR RI terus aktif mendorong implementasi rencana lima aksi ke semua unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Ini dipandang penting sebagai tindak lanjut dirilisnya *Open Parliament* oleh Ketua DPR RI beberapa waktu lalu. Inspektur Utama (Irtama) DPR RI Setyanta Nugraha menjelaskan, lima rencana aksi itu harus dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.



Foto: Jaka | IHR

Inspektur Utama (Irtama) DPR RI Setyanta Nugraha

dan pelayanan informasi legislasi. Kedua, peningkatan penggunaan teknologi informasi parlemen. Ketiga, penguatan keterbukaan informasi publik DPR RI. Dan keempat, penyusunan peta jalan *Open Parliament* Indonesia.

Selain itu, yang terakhir adalah penyusunan kelembagaan *Open Parliament* Indonesia. Di sinilah pentingnya masing-masing unit bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Dan pola kerja rencana lima aksi ini membutuhkan basis teknologi informasi yang memadai. Untuk itulah, Ittama berkepentingan mengundang beberapa unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI untuk mengikuti *workshop* ini yang digelar pada Jumat dan Sabtu dengan mengundang para ahli.

Ditambahkan Totok, semangat menggagas *Open Parliament* berawal dari kunjungan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ke Parlemen Inggris tahun lalu. Sistem *Open Parliament* di Inggris sudah sangat memadai. Tertarik pada sistem itu, DPR RI pun mengundang WFD ke DPR RI untuk melakukan pendampingan bagaimana membangun sistem *Open Parliament*. WFD sendiri adalah organisasi nirlaba dari parlemen Inggris yang ingin mendukung parlemen dan NGO dalam implementasi *Open Parliament*.

“Ke depan kita akan mencari format yang lebih baik sehingga pola kerja sama ini jadi berkelanjutan. Utamanya tidak saja soal *output* tapi juga sistem, sehingga walau tak ada WFD kita bisa jalan. Kerja sama dengan WFD intinya menyegarkan kembali apa *sih* rencana lima aksi yang akan dilaksanakan. Harapan kami, bagaimana memastikan unit-unit kerja sudah melaksanakannya sesuai lima rencana aksi itu secara efektif dan akuntabel,” tutur Totok. ■ mh/sf

Hal ini disampaikan Totok, sapaan akrab Setyanta, usai memberi sambutan dalam *Workshop* bertajuk Peningkatan Akuntabilitas DPR RI Melalui Implementasi Keterbukaan Parlemen. *Workshop* ini bekerja sama dengan *Westminster Foundation for Democracy* (WFD) dan *Indonesian Parliamentary Center*

(IPC), di Kota Tangerang, Banten, Jumat (25/1).

“*Workshop* ini tindak lanjut dari diluncurkannya *Open Parliament* pada 28 Agustus 2018. Dalam peluncuran itu diamanatkan lima rencana aksi,” ungkap Totok. Kelima aksi itu, pertama, peningkatan kualitas tata kelola data

Kinerja BPK Sulsel Dibatasi Anggaran

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Prakosa menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) beserta jajaran, terkait dengan kinerja BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan keuangan daerah.

“Dari pertemuan ini, banyak hal yang didapatkan oleh Komisi XI DPR RI. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik, bahwa semua pemeriksaan bukan berdasarkan kebutuhan dari tujuan pemeriksaan tersebut, melainkan berdasarkan segi anggaran,” kata Prakosa, usai pertemuan di Kantor Perwakilan BPK Sulsel, Makassar, Sulsel, Senin (28/1).

Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, semua pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK Sulsel berdasarkan dari besaran anggaran, sehingga banyak pemeriksaan yang tidak ter-cover karena keterbatasan anggaran.

Di samping itu, terkait dengan kinerja BPK, penilaian yang telah diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Prakosa

(Kementerian PAN-RB) bahwa BPK mendapatkan penilaian dengan kategori A, yakni dengan nilai yang bagus. ■ cas/sf

Foto: Chasbi | IHR

Pelayanan Kepada Peserta Jamkestama Dituntut Maksimal

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, rumah sakit (RS) yang menjadi *provider* PT. Jasindo harus memberikan pelayanan dan fasilitas yang maksimal kepada Anggota DPR RI yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama). Hal ini guna mendukung Anggota Dewan, khususnya dari segi kesehatan, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

“Kita tahu, kerja menjadi seorang Wakil Rakyat itu tidak mudah dan sangat lelah. Bahkan kerjanya bisa sampai 24 jam. Jika sedang rapat bahkan ada yang tidak tidur, namun bukannya kami ingin dimanjakan, tapi memang jika sedang sakit kami tidak ingin merasakannya,” kata Novi, sapaan akrabnya, usai memimpin Kunjungan Kerja BURT DPR RI meninjau Rumah Sakit Siloam Bali,

“Kita tahu, kerja menjadi seorang Wakil Rakyat itu tidak mudah dan sangat lelah. Bahkan kerjanya bisa sampai 24 jam. Jika sedang rapat bahkan ada yang tidak tidur, namun bukannya kami ingin dimanjakan, tapi memang jika sedang sakit kami tidak ingin merasakannya,”

Badung, Bali, Selasa (29/1).

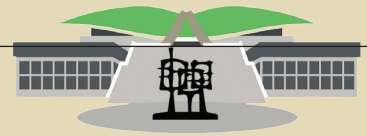
Legislator Partai Gerindra itu menyampaikan, jika pelayanan dan fasilitas yang diterima peserta Jamkestama, terutama Anggota DPR RI sangat maksimal, tentunya akan berpengaruh terhadap kesembuhannya dan kinerjanya dalam menangani urusan negeri ini. “*Support* yang memadai akan berpengaruh pada kinerja legislator agar tidak terganggu. Bukan hanya Anggota DPR saja, tapi semua pejabat negara yang ada di Indonesia juga harus maksimal,” papar Novi.

Novi melanjutkan, tujuan Kunker BURT DPR RI ke RS Siloam dalam rangka meninjau langsung fasilitas dan pelayanannya, karena RS ini merupakan salah satu RS *provider* PT. Jasindo. “Siloam ini pelayanan dan fasilitasnya sangat memenuhi syarat. Tentunya bukan hanya pasiennya saja yang dipikirkan, tapi fasilitas untuk keluarga juga harus baik. Siloam sendiri yang saya tahu sangat memenuhi standar dan syarat,” imbuh legislator dapil Jawa Tengah itu. ■ **tn/sf**



Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti memimpin Tim Kunker Rumah Sakit Siloam Bali

Foto: Taufan | HR



Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan sambutan dalam acara Refleksi Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019 Kinerja Mahkamah Konstitusi, Jakarta (28/1). Foto: Jaka



Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR dipimpin Wakil Ketua Herman Khaeron memantau tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Konflik Pertanahan di Kota Tomohon, Manado, (29/1). Foto: Jaka



Suasana Rapat Kerja Badan Keahlian DPR RI dengan Universitas Fakultas Lembaga Asosiasi yang telah menandatangani nota kesepahaman di Tangerang, (31/1). Foto: Sofyan